

Judul Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Larangan Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Prabu Rama gading,

Isnaini Rodiyah

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Oktober, Tahun 2025



Pendahuluan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang penting, namun di Indonesia masih sering menghadapi masalah seperti prosedur rumit, antrean panjang, dan maladministrasi. Ombudsman RI tahun 2023 mencatat 3.587 laporan pengaduan pelayanan publik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong transformasi digital melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Kabupaten Sidoarjo kemudian menghadirkan SIPRAJA sebagai inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi. Namun, implementasinya di Desa Larangan belum optimal, karena pelayanan manual masih mendominasi sebesar 72,19% dan hanya 17,9% penduduk yang terdaftar sebagai pengguna. Rendahnya pemanfaatan ini dipengaruhi oleh literasi digital yang terbatas, minim sosialisasi, dan kebiasaan warga yang lebih memilih pelayanan langsung.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi SIPRAJA di Desa Larangan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Larangan Kabupaten Sidoarjo ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn?

Metode

| Komponen | Keterangan |
|-------------------------|---|
| Jenis Penelitian | Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan SIPRAJA dalam pelayanan publik di tingkat desa. |
| Lokasi Penelitian | Penelitian dilaksanakan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo , sebagai lokasi implementasi layanan digital SIPRAJA. |
| Informan Penelitian | Informan meliputi operator SIPRAJA, staf pelayanan desa, perangkat desa, serta masyarakat , guna memperoleh perspektif pelaksana dan pengguna layanan. |
| Teori dan Konsep | Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menilai faktor pendukung dan penghambat kebijakan. |
| Teknik Pengumpulan Data | Data dikumpulkan melalui studi literatur serta wawancara mendalam semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi faktual terkait praktik SIPRAJA di lapangan. |
| Teknik Analisis Data | Data dianalisis dengan model Miles & Huberman , melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. |

Hasil

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Akun SIPRAJA Terdaftar di Desa Larangan Tahun 2024

| Keterangan | Jumlah |
|------------------------|--------|
| Total Penduduk | 6.011 |
| Akun SIPRAJA Terdaftar | 1.074 |
| Persentase Pengguna | 17,9% |

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pelayanan Manual dan Online melalui SIPRAJA di Desa Larangan Tahun 2023

| Jenis Layanan | Jumlah Layanan |
|----------------|----------------|
| Manual/Offline | 719 |
| Online | 277 |

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPRAJA di Desa Larangan belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan pelayanan publik digital. Berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Pertama, dari aspek standar dan sasaran kebijakan, SIPRAJA dirancang untuk mempermudah pelayanan administrasi secara cepat dan efisien, namun realisasinya masih didominasi pelayanan manual sehingga target digitalisasi belum tercapai.

Kedua, dari aspek sumber daya, keterbatasan literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama, terutama bagi warga lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan aplikasi.

Ketiga, dari aspek komunikasi antar organisasi, sosialisasi SIPRAJA dinilai belum maksimal sehingga informasi mengenai manfaat dan prosedur layanan belum merata diterima masyarakat.

Keempat, dari aspek karakteristik pelaksana, perangkat desa sebenarnya mendukung kebijakan ini dan menilai SIPRAJA mampu mempercepat pelayanan, tetapi pelaksanaan belum optimal karena masih bergantung pada kesiapan pengguna.

Dengan demikian, kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi lapangan menunjukkan bahwa implementasi SIPRAJA memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas digital masyarakat, serta dukungan sumber daya agar pelayanan publik berbasis aplikasi dapat berjalan efektif di tingkat desa.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SIPRAJA di Desa Larangan belum berjalan optimal karena pelayanan administrasi masih didominasi secara manual. Rendahnya pemanfaatan SIPRAJA menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan digitalisasi pelayanan dengan kondisi nyata di masyarakat. Hambatan utama berasal dari keterbatasan literasi digital warga, minimnya sosialisasi, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih pelayanan tatap muka.

Meskipun demikian, perangkat desa menilai SIPRAJA memiliki potensi besar dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan publik apabila didukung peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan strategi implementasi di tingkat desa.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital, khususnya dalam konteks aplikasi SIPRAJA di tingkat desa, dengan menggunakan perspektif teori Van Meter dan Van Horn.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Larangan dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan efektivitas pelayanan SIPRAJA melalui penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi sumber daya pelaksana agar pelayanan publik berbasis aplikasi dapat berjalan lebih maksimal.

Referensi

- I. Kristian, "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 21, no. 2, pp. 88–98, 2023, [Online]. Available: <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- S. Soewita, B. Isnaeni, M. I. Hukum, F. Hukium, and U. Pamulang, "Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Efisiensi Di Era Digital Untuk Mewujudkan Clean And Clear Good Governance," vol. 6, no. 1, pp. 238–256, 2025.
- B. Lahadia, *Laporan Kinerja Tahun 2023 Semester I*, vol. 4, no. 3. 2024.
- S. Mariano, "Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- Rafiuddin, Nurwahidah, Muhammad Akbar, and Nasrullah, "Seminar Pembuatan Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM untuk Mengakses Pendanaan KUR di Bank," *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, vol. 1, no. 1, pp. 70–80, 2024, doi: 10.34304/joehr.v1i1.213.
- A. Chuzairi, "Implementasi E-Government Dinas Pendidikan Daerah Pada Kondisi Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)," *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, vol. 1, no. 2, pp. 205–211, Aug. 2020, doi: 10.35961/tanjak.v1i2.158.
- D. P. Saputra and A. Widiyarta, "Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo." [Online]. Available: <https://ombudsman.go.id>,
- B. I. Ketentuan and U. Pasa, "PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA," 2018. Accessed: Jul. 30, 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- A. Arief, and M. Yunus Abbas, "Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," 2021. doi: 10.33387/protk.v8i1.1978.
- F. Oribel and S. Wibawani, "Efektivitas Sipraja Di Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 8, no. 2, pp. 275–285, Jun. 2023, doi: 10.33506/jn.v8i2.2422.

